



CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS OF POLICE OFFICER'S NEGATIVE REPRESENTATION TOWARD #PERCUMALAPORPOLISI ON TWITTER/X

ANALISIS WACANA KRITIS REPRESENTASI NEGATIF APARAT KEPOLISIAN MELALUI TAGAR #PERCUMALAPORPOLISI DI TWITTER/X

Nisrina Dauty¹, Cece Sobarna², Nani Darmayanti³

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran

¹e-mail: nisrina20021@mail.unpad.ac.id, ²e-mail: cece@unpad.ac.id, ³e-mail: n.darmayanti@unpad.ac.id

Article history:

Received
26 April 2024

Received in revised form
20 Mei 2024

Accepted
26 Mei 2024

Available online
Mei 2024

Keywords:
#Percumalaporpolisi;
Discourse Analysis; Police
Officer; Representation.

Kata Kunci:
#Percumalaporpolisi; Analisis
Wacana Kritis; Aparat
Kepolisian; Representasi.

DOI
10.22216/kata.v8i1.2884

Abstract

Social criticism of the phenomenon happened on social media with popularized hashtags like #percumalaporpolisi on Twitter. Police officer incompetence in a sexual assault case in Luwu Timur, South Sulawesi, triggers citizens to create this hashtag. This research aims to describe the negative representation of Police officers by Indonesian Twitter users through #percumalaporpolisi. The qualitative research method used in this research is Norman Fairclough's critical discourse analysis theory. Indonesian Police officers explicitly and implicitly represented through words usage, and/or sentences in negative ways. On the other side, Indonesian netizens (Twitter users) have been known for their distrust towards police officers for a long time, tending to use harsh words, posting their disagreement towards something harshly, and becoming the most impolite netizens in southeast Asia. Lastly, Police officers have had several controversial histories, followed by the exposed scandal of sexual harassment in Luwu Timur, explained as a social practice dimension. The negative representations are exposed both explicitly and implicitly through words and sentences. The representations were affected by how netizens interacted on social media perceiving police officers and the behavior of the netizens. It was getting worse as scandals in the police institutions were also supported by police impunity.

Abstrak

Fenomena kritik sosial yang umum di masyarakat melahirkan tagar viral seperti #percumalaporpolisi. Tagar tersebut berawal dari kritik masyarakat atas polisi pada kasus pemerkosaan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan representasi negatif dalam tagar #percumalapor polisi di Twitter/X. Metode pada penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan analisis wacana kritis Norman Fairclough. Penelitian ini memaparkan bagaimana aparat kepolisian dideskripsikan melalui representasi negatif oleh pengguna twitter. Mulai dari penggunaan kata dengan konteks dan konotasi negatif, hingga rangkaian kombinasi anak kalimat dan antarkalimat dengan representasi negatif aparat kepolisian. Secara konteks dimensi praktik wacana, kemunculan tagar ini dipengaruhi oleh latar belakang warganet Indonesia dan reaksi terhadap perilaku aparat kepolisian. Kemudian, pembahasan mengenai kontroversi kepolisian sejak dahulu kala dipaparkan dalam dimensi praktik sosial, terutama kasus kekerasan seksual di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Rangkaian representasi negatif ini muncul secara implisit dan eksplisit, dipengaruhi oleh perilaku warganet Indonesia dalam bermedia sosial dan seberapa percaya warganet terhadap aparat kepolisian, dan sorotan perilaku negatif sejumlah aparat kepolisian, disertai

Corresponding author.

E-mail address: nisrina20021@mail.unpad.ac.id

dengan hak impunitas POLRI yang telah dikeluhkan sejak lama oleh warganet.

PENDAHULUAN

Media sosial dan perkembangan teknologi komunikasi bukanlah hal yang asing bagi Masyarakat saat ini. Tidak salah apabila menyatakan bahwa media sosial sudah seperti candu bagi masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda. Media sosial memiliki kemudahan tersendiri bagi masyarakat sehingga sejumlah masyarakat, terutama remaja dapat dengan betah menghabiskan waktunya hampir sehari-hari di media sosial (Zeva et al., 2023). Selain dampak negatifnya, kemudahan dalam berkomunikasi, serta pertukaran informasi dengan mudah dan cepat tanpa batasan jarak dan waktu merupakan dampak positif signifikan dari media sosial. Hal ini sejalan dengan fungsi utama media komunikasi di era globalisasi sebagai medium persebaran informasi terkait peristiwa – peristiwa di suatu wilayah (SusyLOWATI, 2019).

Fenomena – fenomena sosial yang terjadi, baik dalam skala nasional maupun mancanegara menarik perhatian warganet. Media sosial memfasilitasi warganet untuk beropini atau berargumen selama hal tersebut tidak mengarah kepada ujaran kebencian, atau memicu konflik SARA (Suku, ras, dan agama). Chica Septia Ningsih et al. (2021) menyatakan bahwa kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia merupakan hak individu, yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) tentang kebebasan untuk berserikat atau berpendapat. Salah satu dampak dari fenomena tersebut adalah munculnya kritik terbuka dari warganet (warga internet, pengguna aktif internet) terhadap individu terkenal (tokoh publik), atau instansi pemerintahan.

Kritik tersebut turut menjadi bagian dari kontrol sosial yang berlangsung di tengah masyarakat, dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Pada dasarnya, kritikan tersebut memiliki maksud baik, walaupun tidak jarang ada kritikan yang berbau ujaran kebencian tanpa disadari. Kritik tersebut hadir bukan tanpa ada pemicunya, warganet memiliki alasan tersendiri di balik kritikan tersebut. Sejumlah keluhan dari warganet terhadap instansi pemerintahan, terutama pelayanan publik cukup beragam. Keluhan tersebut berupa pelayanan yang kurang baik hingga keterbatasan sarana dan prasarana di fasilitas (Agustina, 2019).

Institusi Kepolisian merupakan contoh instansi yang tidak luput dari kritikan masyarakat. Masyarakat tidak segan untuk mengkritik aparat kepolisian atas kinerjanya di media sosial. Wujud ujaran kritikan tersebut cukup beragam, mulai dari yang sopan, hingga mengarah kepada hujatan. Fenomena ini masih belum banyak diteliti dengan pendekatan teori linguistik, terutama dengan pendekatan analisis wacana kritis. Sebagai contoh, ujaran kritik dalam unggahan bertag *#Percumalaporpolisi* dan sejenisnya, merupakan fenomena kritik masyarakat terhadap aparat kepolisian, yang belum banyak diteliti menggunakan pendekatan linguistik berbasis teori wacana kritis. Hal ini memberikan ide bagi penelitian ini untuk menjabarkan fenomena tersebut dengan pendekatan wacana kritis.

Setiap aparat kepolisian yang berperilaku menyimpang diberitakan media, masyarakat tidak segan mengkritik aparat kepolisian atas perilaku negatifnya. Hal tersebut dapat tersebar melalui mulut ke mulut, maupun secara terbuka di media sosial. Salah satu hal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap citra kepolisian sebagai aparat keamanan adalah bagaimana masyarakat memandang seberapa efektif kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya (Wardani & Kadarisman, 2015). Perilaku negatif sejumlah aparat kepolisian yang dikeluhkan oleh masyarakat seakan – akan turut dibenarkan oleh liputan negatif media massa terhadap aparat kepolisian. Beberapa perilaku tidak patut tersebut berupa pungutan liar, pembunuhan, pencurian, bahkan keterlibatan dalam perdagangan gelap barang haram (narkoba). Tidak hanya itu, KontraS (2022) pada tahun 2022, membenarkan adanya sejumlah aparat kepolisian yang bermasalah melalui laporan khusus dalam hari Bhayangkara ke – 76, di mana laporan tersebut memaparkan sekitar 677 peristiwa kekerasan

yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sebanyak 928 jiwa luka-luka, dan 59 jiwa tewas dan 1240 ditangkap merupakan akibat dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut. Wacana negatif sejumlah perilaku aparat kepolisian tersebar luas di media massa dan media sosial. Persebaran berita tersebut sejalan dengan respon negatif warganet terhadap aparat kepolisian. Respon ini dapat dikatakan sebagai komplain masyarakat yang turut mengadukan perilaku negatif sejumlah aparat kepolisian (Astuti, 2022).

Secara tidak langsung, pembicaraan warganet mengenai perilaku aparat kepolisian yang negatif membentuk representasi negatif tersebut. Tagar #percumalaporpolisi di media sosial merupakan salah satu contoh dari kritik masyarakat terhadap aparat kepolisian di Indonesia. Kemunculan tagar ini dipicu oleh pemberitaan kekerasan seksual di Luwu Timur, Sulawesi Selatan oleh organisasi nirlaba bernama *Project Multatuli*. Aparat kepolisian dalam pemberitaan tersebut ditenggarai tidak menangani kasus kejahatan tersebut, dan terkesan melindungi pelaku. Kemudian, reaksi negatif warganet berupa viralnya tagar #percumalaporpolisi di media sosial *Twitter/X* muncul. Pemberitaan negatif lainnya mengenai perilaku aparat kepolisian tetap terus bermunculan setelah tagar #percumalaporpolisi tercipta. Beragam kasus mulai dari pembunuhan sesama polisi, aparat kepolisian terlibat dalam penggelapan barang bukti narkoba, hingga tragedi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, merupakan pemberitaan negatif yang menjadikan #percumalaporpolisi tetap terus berlangsung sepanjang tahun 2022 di media sosial.

Tagar #percumalaporpolisi yang viral di twitter tidak terbatas dalam penggunaan kata, frasa dan kalimat saja menurut sudut pandang kebahasaan. Rangkaian kata, frasa maupun kalimat secara keseluruhan dalam setiap unggahan tersebut tentu menampilkan bagaimana aparat kepolisian direpresentasikan. Kata, frasa dan kalimat pada dasarnya menampilkan deskripsi mengenai suatu pihak. Akan tetapi, pola penggunaan bahasa yang merepresentasikan aparat kepolisian dalam tagar ini, tidak dapat dipisahkan dari konteks warganet sebagai penyusun wacana dan fenomena sosial terkait aparat kepolisian. Peranan teks, latar belakang warganet dan fenomena terkait aparat kepolisian dalam representasi pada tagar #percumalaporpolisi ini akan semakin jelas terlihat dalam sudut analisis wacana kritis. Sebab, dalam sudut pandang analisis wacana kritis, kemunculan suatu teks dan bagaimana suatu pihak dideskripsikan tidak dapat dipisahkan dari unsur di luar teks tersebut.

Analisis wacana kritis pada dasarnya merupakan analisis yang berupaya menguraikan hubungan antara teks, produksi teks dan konteks sosial. Analisis wacana kritis merupakan analisis yang berfokus pada wacana dan unsur di luar wacana yang memengaruhinya. Kemunculan suatu wacana dipengaruhi oleh unsur di luar wacana itu sendiri. Sebab, suatu teks tidak hanya terdiri dari satu kesatuan dan koherensi antarkata, frasa, klausa dan kalimat, tetapi juga latar belakang dari penyusun wacana, serta fenomena sosial yang melatarbelakanginya. Albaburrahim & Sujinah (2017) menyatakan bahwa analisis wacana kritis memiliki pandangan, yang menyatakan penggunaan bahasa dalam suatu wacana atau tuturan, adalah bagian dari "praktik sosial". Wacana sebagai bagian dari praktik sosial memberikan pesan secara implisit adanya hubungan dialektik antara peristiwa diskursif dengan segala situasinya, insitusi, dan struktur sosial yang meliputinya. Hubungan dialektik antara peristiwa diskursif, situasi, institusi dan struktur sosial saling berkaitan satu sama lain secara dua arah.

Beberapa teori pendekatan analisis wacana kritis dipopulerkan oleh sejumlah ahli. Walaupun ada beberapa hal yang menjadi pembeda pada setiap pendekatan dari para ahli, semua pendekatan bertumpu pada tiga dimensi teks (wacana). Tiga dimensi wacana atau teks secara fundamental meliputi dimensi teks(wacana), praktik wacana, dan praktik sosial. Salah satu pendekatan analisis wacana kritis yang populer adalah pendekatan analisis Norman

Fairclough (2003). Pendekatan analisis wacana kritis analisis ini dirangkai berdasarkan sudut pandang linguistik. Walaupun demikian, analisis wacana kritis dengan pendekatan ini tetap memiliki tiga dimensi analisis yang sama dengan pendekatan dari ahli lainnya (dimensi teks, praktik wacana dan praktik sosial).

Ada tiga dimensi analisis wacana dalam model analisis ini. Ketiga dimensi yang dimaksud adalah teks, praktik wacana dan praktik sosial, sebagaimana dijelaskan oleh pemaparan Eriyanto (2015), dimensi teks bersandar kepada analisis linguistik pada tataran kosaksata, semantik serta tata kalimat, kemudian kohesi dan koherensi untuk melihat representasi atau ideasional, di mana ada sesuatu yang hendak ditampilkan membawa ideologis tertentu. Kemudian, Relasi, di mana analisis merujuk pada kontruksi hubungan wartawan dan pembaca dalam penyampaian teks, serta identitas yang merujuk pada konstruksi identitas wartawan, pembaca dan bagaimana identitas ini ditampilkan. Aksi, representasi dan identifikasi dalam teks terlihat melalui keseluruhan teks dan dalam bagian – bagian kecil teks.

Dimensi berikutnya yang menjadi bagian dari analisis dengan pendekatan ini adalah praktik wacana. Praktik wacana berkaitan dengan bagaimana produksi dari sebuah teks dan konsumsi dari teks yang diproduksi tersebut. Praktik wacana merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Sebuah teks pada dasarnya tercipta melalui proses produksi teks yang berbeda-beda. Suatu teks diproduksi dengan skema terstruktur, berawal pada proses pengambilan hingga penerbitan berita. Setiap media memiliki cara atau aturan dalam produksi berita yang berbeda – beda. Produksi teks berita tidaklah sama seperti penulisan syair oleh seorang penyair. Konsumsi teks dapat berbeda – beda dalam konteks sosialnya. Distribusi teks bergantung pada pola dan jenis teks dan sifat institusi yang melekat pada teks tersebut. Apabila dimensi teks dan dimensi praktik wacana merupakan dimensi yang berkaitan dengan aspek internal teks, maka dimensi praktik sosial merupakan aspek yang berkaitan dengan hal – hal yang berada di luar teks. Analisis pada dimensi praktik sosial merupakan Sementara itu, praktik sosial adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks, seperti konteks situasi. Konteks yang dimaksud adalah konteks secara luas. Lebih luas dibandingkan dengan praktik institusi pada media itu sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik masyarakat.

Dimensi praktik sosial merupakan jalinan dari beberapa elemen sosial, yang diasosiasikan dengan beberapa aspek kehidupan sosial. Garis besar dari analisis dimensi praktik sosial adalah hubungan antara dimensi dalam bahasa dan di luar bahasa. Dimensi ini dapat diartikan sebagai kombinasi unsur aksi dan interaksi, hubungan atau kekerabatan sosial, individu (dengan keyakinannya, perilaku, latar belakang, dan sebagainya), dunia material, dan wacana. menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan untuk menunjukkan kelebihan ilmiah dan kebaharuan dari artikel yang dibuat dengan studi terdahulu. Penulis harus menyatakan tujuan di akhir bagian pendahuluan secara jelas dan lugas (Fairclough, 2003). Teori analisis wacana kritis ini memiliki peranan penting sebagai kerangka dasar pengetahuan dalam menginterpretasikan representasi oleh pengunggah terhadap suatu pihak, serta latar belakang pengunggah, dan fenomena sosial yang saat itu mempengaruhi pengunggah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana representasi aparat kepolisian oleh warganet pengguna Twitter/X. Representasi suatu pihak dapat muncul secara implisit maupun eksplisit melalui penggunaan kata, frasa hingga rangkaian antarkalimat. Tujuan dari penelitian ini turut dipengaruhi oleh topik penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas mengenai analisis wacana kritis dalam berita Liputan6.com tentang #percumalaporpholisi, pada Oktober 2021, yang dilakukan Fitria & Candrasari (2023). Data yang digunakan adalah data dari media berita daring. Penelitian yang dilakukan mendeskripsikan bahwa pemberitaan mengenai tagar tersebut memiliki kecenderungan

menyoroti bagaimana tagar tersebut viral dan sudut pandang aparat kepolisian atas viralnya tagar tersebut. Tidak lupa, proses pemberitaan tagar tersebut oleh liputan6.com juga dipengaruhi dengan kerjasama pihak lainnya. Kemudian, faktor fenomena sosial yang melatarbelakangi viralnya #percumalaporpolisi dan kemunculan pemberitaan tersebut juga berasal dari latar belakang masyarakat yang sedang kecewa dengan kontroversi aparat kepolisian. Sementara itu, penelitian ini menggunakan data yang berasal dari *Twitter/X*, berfokus pada aspek representasi aparat kepolisian dalam unggahan/*Tweet* dalam wacana yang berwujud unggahan *Twitter/X*. Praktik wacana dalam penelitian ini adalah warganet, bukan pada media massa. Analisis kemudian dilengkapi dengan deskripsi fenomena sosial kontroversi aparat kepolisian, termasuk kasus di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Letak kebaharuan dari peneliti ini berpusat kepada analisis yang difokuskan pada representasi polisi dalam #percumalaporpolisi, menggunakan sumber data *Twitter/X* yang juga menjadi titik awal kemunculan tagar tersebut. Unsur – unsur tersebut dijabarkan dalam keseluruhan artikel ini lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Objek untuk penelitian dalam artikel ini adalah representasi negatif aparat kepolisian, yang terpampang secara implisit maupun eksplisit dalam tagar #percumalaporpolisi. Representasi negatif aparat kepolisian ini terdapat dalam setiap unggahan bernada kritik maupun hujatan dengan menggunakan tagar tersebut. Sumber data untuk penelitian berasal dari media sosial *Twitter/X*. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah unggahan yang menggunakan tagar #percumalaporpolisi, dan isi unggahan sesuai dengan pembicaraan tagar tersebut. Secara khusus, unggahan yang dimaksud adalah unggahan yang ditujukan kepada aparat kepolisian atau institusi kepolisian, dan mendeskripsikan kritik, keluhan, dan tanggapan terhadap tindakan aparat kepolisian. Data pendukung berupa artikel berita dan laporan dari organisasi nirlaba yang membahas mengenai fenomena perilaku negatif polisi, dan perilaku warganet Indonesia untuk dimensi praktik teks dan praktik wacana.

Pengumpulan data menggunakan teknik simak dan catat. Teknik simak dilakukan dengan penelusuran data pencarian data dilakukan secara manual di situs *Twitter/X*. Penelusuran data dilakukan dengan pencarian pada kolom pencarian di situs tersebut, serta melibatkan penggunaan filter pencarian spesifik yang memungkinkan pengambilan data dari tahun 2021 dan 2022. Berikutnya, isi dari unggahan disimak secara seksama untuk memastikan relevansi antar tagar #percumalaporpolisi dan isi unggahan tersebut. Kriteria pemilihan data mencakup penggunaan bahasa dan maksud unggahan. Selanjutnya, teknik catat digunakan untuk menyimpan data yang telah diperoleh dari hasil penelusuran di kolom pencarian situs tersebut. Data sebanyak empat buah unggahan (*tweet*) bertagar #percumalaporpolisi, berasal dari empat akun *Twitter/X* yang berbeda. Dua unggahan tahun 2021 atas nama pengguna @audimarch dan @semongk000, dan dua unggahan tahun 2022 atas nama pengunggah @Odink_Ozburne dan @LightArooms. Serangkaian data berikut ini diambil dari *Twitter/X* melalui proses penelusuran di kolom pencarian. Tagar #percumalaporpolisi dalam rentang waktu tersebut tengah viral di media sosial. Terpantau hingga kini, tagar tersebut masih tetap ada walau tidak seramai atau se-viral pada rentang waktu tersebut.

Penelitian telah dilaksanakan dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan pada analisis wacana kritis (Norman Fairclough, 2003). Analisis difokuskan pada representasi dalam dimensi teks, dengan menganalisis penggunaan kata atau frasa seperti konotasi atau makna, hingga rangkaian antarkalimat. Maksud atau pesan implisit pengunggah mengimplikasikan representasi aparat kepolisian dalam tagar #percumalaporpolisi turut dianalisis. Analisis dilanjutkan pada dimensi praktik wacana, yang menfokuskan pada latarbelakang warganet sebagai pihak yang memproduksi teks. Analisis berikutnya, analisis

dimensi praktik sosial membahas mengenai fenomena di balik percumalaporpolisi dan sorotan terhadap perilaku aparat yang memicu tagar tersebut. Penyajian data dengan pendekatan teori ini secara bertahap dimulai dari analisis dimensi teks, kemudian disusul dengan pemaparan analisis dimensi praktik wacana, dan diakhiri dengan pemaparan analisis dimensi praktik sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unggahan (*tweet*) bertagar #percumalaporpolisi menampilkan representasi aparat kepolisian secara negatif melalui penggunaan bahasa seperti penggunaan kata atau rangkaian kalimat tertentu dengan konotasi negatif, serta didukung oleh latar belakang warganet dan sederet kontroversi aparat kepolisian. Pemberitaan masif dan tidak terkendali terhadap setiap proses investigasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian oleh media massa memiliki andil dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap sosok ideal polisi. (Huey & Broll, 2012)

Analisis pada dimensi teks dalam data mengungkapkan adanya representasi negatif aparat kepolisian. Wujudnya berupa rangkaian antar anak kalimat dan rangkaian keseluruhan antarkalimat berupa penggunaan kata berkonotasi negatif hingga rangkaian kalimat bernada negatif terhadap polisi. Dimensi praktik wacana yang menjabarkan perilaku negatif warganet Indonesia, dan tingkat kepercayaan mereka terhadap aparat kepolisian. Analisis representasi negatif ini sejalan dengan teori analisis wacana kritis (Norman Fairclough, 2003) yang menyatakan bahwa bagaimana seseorang atau suatu pihak ditampilkan dalam teks berkaitan dengan dimensi teks(wacana), praktik wacana dan praktik sosial. Representasi erat kaitannya dengan apa yang terdapat di dalam teks maupun di luar teks. Secara terperinci, hasil analisis wacana representasi negatif aparat kepolisian ini diuraikan pada pemaparan berikut ini.

A. Analisis Dimensi Teks

1. Representasi dalam anak kalimat

Representasi negatif aparat kepolisian dalam sudut pandang warganet dapat diamati dalam kutipan tweet berikut ini. tweet ini diunggah oleh di tahun 2022 di dalam tagar #percumalaporpolisi. Secara garis besar, teks berikut ini mengandung kritik sekaligus keluh kesah terhadap oknum aparat kepolisian yang dianggap tidak dapat menangani kejahatan geng motor dengan baik. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum dianggap abai oleh pengunggah. Hal ini disebabkan aparat kepolisian tidak peduli dan tidak serius dalam penanganan kejahatan geng motor. Padahal, kasus kejahatan tersebut sudah meresahkan Masyarakat Bandung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini kemudian memicu pengunggah untuk turut meramaikan tagar #percumalaporpolisi dengan menulis keluh kesah dan kekecewaan terhadap aparat kepolisian dalam kasus geng motor.

Tabel 1. Deskripsi kutipan tweet dari pengguna @odink_ozburne

Kutipan Tweet 1	
Isi Kutipan	<i>Geng² motor seperti ini sdh lama ada di Bandung. Dari dulu kerjanya memang slalu bikin masalah, sok jago. beraninya maen kroyokan. Hebatnya lg polisi sepertinya takut ama mereka/Sdh bnyk warga yng mrasa trganggu dengan ulah geng tai ini Tp polisi tdk pernah menanggapi laporannya Polisi mendadak jadi buta dan tuli Kalo ada warganya yang melapor sebagai korban geng tai #percumalaporpolisi</i>
Sumber	@odink_ozburne
Tahun	2022

Representasi melalui anak kalimat dapat diamati dengan penggunaan kata “takut” yang ditujukan kepada aparat kepolisian dalam teks berikut ini. Penggunaan kata takut digunakan oleh pengunggah untuk mendeskripsikan aparat kepolisian secara negatif, mendeskripsikan melalui sikap atau perilaku yang menjadi petunjuk representasi. Pada kalimat berikut ini, penggunaan kata “takut” mendeskripsikan aparat kepolisian yang seakan tidak mampu menangani geng motor. Kemudian, kata buta dan tuli turut digunakan oleh pengunggah.

- a. *Geng² motor seperti ini sdh lama ada di Bandung. Dari dulu kerjaannya memang slalu bikin masalah, sok jago.beraninya maen kroyokan. **Hebatnya lg polisi sepertinya takut ama mereka*** (geng – geng motor seperti ini sudah lama ada di Bandung. Dari dulu kerjaannya memang selalu bikin masalah, sok jago. Beraninya main keroyokan. Hebatnya lagi, polisi sepertinya takut dengan mereka)
- b. *Sdh bnyk warga yng mrasa trganggu dengan ulah geng tai ini Tp polisi tdk pernah menanggapi laporannya Polisi mendadak jadi **buta dan tuli*** (sudah banyak warga yang merasa terganggu dengan ulah geng tai ini tetapi polisi tidak pernah menanggapi laporannya. Polisi mendadak menjadi buta dan tuli)

Kata “takut” pada dasarnya identik dengan makna negatif. Kata “takut” memiliki makna yang berlawanan dengan sifat “berani”. Penggunaan kata “takut” memiliki makna ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Sama seperti halnya dengan “buta” dan “tuli” yang dianggap memiliki konotasi negatif, yaitu kelemahan atau sifat lemah manusia. Penggunaan kata takut yang ditujukan untuk mendeskripsikan perilaku sejumlah aparat kepolisian menegaskan bahwa aparat kepolisian tidak memiliki keberanian untuk mengatasi penyakit masyarakat.

Kata “buta” dan “tuli” dalam teks memiliki makna bahwa aparat kepolisian tidak mau peduli dengan adanya laporan kejahatan geng motor dari Masyarakat. Sehingga, dengan penggunaan kata – kata dalam kalimat tersebut, aparat kepolisian direpresentasikan sebagai aparat yang tidak berdaya dan tidak peduli dengan Masyarakat.

Representasi serupa juga ditemukan dalam *tweet* lainnya yang lebih singkat, namun memiliki pesan lugas terhadap representasi negatif aparat kepolisian. Pengunggah mendeskripsikan kekesalannya terhadap oknum aparat kepolisian yang tidak profesional bahkan tidak jujur. Secara keseluruhan, *tweet* ini mendeskripsikan betapa buruknya perilaku aparat kepolisian. Berikut ini adalah kutipan *tweet* yang dimaksud.

Tabel 2. Deskripsi kutipan *tweet* dari pengguna @audimarch

Kutipan <i>Tweet</i> 2	
Isi Kutipan	“Udah kena tipu orang, kena begal halus sama polis lagi #percumalaporpolisi”
Sumber	@audimarch
Tahun	2021

Penggunaan kata “begal” yang disematkan kepada aparat kepolisian dalam dimensi kebahasaan pada teks kutipan berikut ini memiliki konotasi negatif. Hal ini disebabkan oleh makna dari kata “begal”, yang merupakan sesuatu yang identik dengan kejahatan, sebab identik dengan kata verba “mencuri”, dan “merampok”. Konteks kata “begal”, dalam frasa “begal halus” yang dikaitkan kepada aparat kepolisian menyatakan bahwa polisi adalah perampok. Begal halus dalam kalimat ini dapat bermakna bahwa aparat kepolisian meminta atau memaksa pengunggah untuk membayar

pungli. Hal ini memberikan gambaran representasi negatif aparat kepolisian sebagai pihak yang “mata duitan” sebab melakukan pungli terhadap pelapor.

Tabel 3. Deskripsi kutipan tweet dari pengguna @LightArooms

Kutipan Tweet 3	
Isi Kutipan	“Gw udah gak takut sekarang. Polisi Indonesia MAYORITAS OKNUMNYA CUPU, TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, maunya lari dari masalah atau nggak nunggu viral baru jalan. Hadehhh OKNUM OKNUM #percumalaporpolisi”
Sumber	@LightArooms
Tahun	2022

Representasi negatif aparat kepolisian ditampilkan dalam penggunaan kata adjektiva “cupu” dan “tidak bertanggung jawab”. Kata “cupu” memiliki konotasi negatif, sebab kata tersebut berakar dari kata “culun” yang berarti naif dan tidak berpengalaman. Kata tersebut digunakan oleh pengunggah untuk mendeskripsikan aparat kepolisian atas kinerjanya yang tidak profesional, seakan – akan menghindari dari kasus atau keluhan dari masyarakat.

Penggunaan kata adjektiva “viral” turut digunakan dalam konteks negatif untuk menjelaskan perilaku aparat kepolisian yang hanya “bertindak jika kasus tersebut viral atau ramai”. Kata “viral” memiliki makna sesuatu yang cepat tersebar dan ramai dibicarakan banyak orang dalam konteks dunia maya. Pengunggah menggunakan kata tersebut dalam mengkritik aparat kepolisian dalam potongan kalimat “nunggu viral baru jalan” sebab aparat kepolisian hanya baru bergerak apabila suatu kasus menjadi viral di kalangan masyarakat (warganet).

Penyebutan kata nomina “oknum” untuk aparat kepolisian memiliki konotasi negatif, Hal ini disebabkan kata “oknum” memiliki arti untuk penyebutan orang dalam konteks tidak baik seperti dalam kasus perilaku buruk. Penggunaan kata tersebut menunjukkan bahwa aparat kepolisian cenderung bercitra negatif di mata masyarakat atau warganet.

2. Representasi dalam kombinasi antaranak kalimat.

Tidak hanya dalam anak kalimat, representasi ini dimunculkan oleh pengunggah dalam bentuk lainnya. Representasi negatif aparat kepolisian dalam unggahan bertagar #percumalaporpolisi tidak hanya berlaku pada representasi dalam anak kalimat. Representasi negatif tersebut turut ditemukan dalam rangkaian antar anak kalimat. Rangkaian antar anak kalimat berikut ini

“Sdh bnyk warga yng mrasa trganggu dengan ulah geng tai ini Tp polisi tdk pernah menanggapi laporannya”(sudah banyak warga yang merasa terganggu dengan ulah geng tai ini tapi polisi tidak pernah menanggapi laporannya)

Rangkaian anak kalimat berikut mendeskripsikan betapa abainya aparat kepolisian terhadap Masyarakat. Konteks dari kalimat tersebut menyatakan bahwa masyarakat sudah resah dengan kejahatan geng motor. Tetapi, polisi dideskripsikan bersikap abai dengan adanya laporan tersebut. Hal ini ditampilkan dengan penggunaan kata hubung pertentangan pada kalimat yaitu kata hubung “tapi”. Kata hubung ini digunakan untuk

mendeskripsikan keluhan masyarakat yang justru tidak ditanggapi oleh aparat kepolisian dalam rangkaian kalimat tersebut. Penggunaan kata hubung dalam rangkaian kalimat tersebut memberikan pesan bahwa aparat kepolisian tidak lagi peduli dengan Masyarakat. Masyarakat mengeluhkan kejahatan tetapi diabaikan oleh aparat kepolisian

3. Representasi dalam rangkaian antar kalimat

Analisis wacana kritis pada dimensi teks turut menganalisis representasi dalam wujud kesatuan teks yang utuh. Rangkaian kalimat pada teks secara keseluruhan pada *tweet* ini merepresentasikan aparat kepolisian secara negatif. Tagar #percumalaporpolisi yang turut disematkan pada *tweet* berikut bukanlah satu – satunya yang menunjukkan representasi negatif aparat kepolisian.

Tabel 4. Deskripsi Kutipan Tweet dari Pengguna @semongk000

Kutipan Tweet 4	
Isi Kutipan	Senior kami menjadi korban tabrak lari oleh supir truk di pronojiwo. Beliau meninggal langsung di tempat. Aparat berat untuk mengusut. Kami relawan mempertaruhkan nyawa untuk semuanya. Saksi mata tidak mau bersaksi, bahkan tkp langsung di bersihkan. #percumalaporpolisi
Sumber	@semongk000
Tahun	2021

Kutipan *tweet* yang diunggah oleh pengguna @semongk000 mendeskripsikan representasi aparat kepolisian secara implisit dari rangkaian keseluruhan antarkalimat. Pengunggah atau pengguna yang bersangkutan mengungkapkan pengalaman buruk yang pernah dialaminya terkait dengan kinerja aparat kepolisian. Serangkaian kalimat dalam unggahan ini menampilkan representasi negatif aparat kepolisian.

Pengunggah mengawali unggahan ini dengan keluh kesah dari pengalaman buruknya saat menangani korban kecelakaan tabrak lari. Kemudian, pertengahan unggahan menegaskan sisi buruk aparat kepolisian yang tidak profesional dan mengabaikan masyarakat yaitu kalimat “*aparat berat untuk mengusut*” dan akhir kalimat “*saksi mata tidak mau bersaksi, bahkan tkp langsung dibersihkan*”. Kalimat demikian memberikan pesan implisit bahwa aparat tidak profesional dengan tindakannya yang mengabaikan laporan dari pengunggah dan teman – temannya sesama relawan.

Sementara itu, kutipan *tweet* sebelumnya (*tweet 1*) turut memberikan deskripsi bagaimana aparat kepolisian memiliki representasi negatif melalui rangkaian antarkalimat. Teks berikut ini tersusun dari sudut pandang pengunggah atas maraknya kejahatan geng motor

“Geng² motor seperti ini sdh lama ada di Bandung. Dari dulu kerjanya memang slalu bikin masalah, sok jago. beraninya maen kroyokan. Hebatnya lg polisi sepertinya takut ama mereka/Sdh bnyk warga yng mrasa trganggu dengan ulah geng tai ini Tp polisi tdk pernah menanggapi laporannya Polisi mendadak jadi buta dan tuli Kalo ada warganya yang melapor sebagai korban geng tai #percumalaporpolisi” (@odink_ozburne – 2022)

Kutipan teks dalam *tweet* ini mendeskripsikan representasi aparat kepolisian. Teks dalam *tweet* ini merepresentasikan aparat kepolisian dari sudut pandang pengunggah. Pengunggah mendeskripsikan aparat kepolisian sebagai pihak dengan representasi negatif melalui rangkaian argumentasi dalam teks. Apabila diamati dengan seksama, teks ini turut menonjolkan keluh – kesah warganet yang ditujukan kepada aparat kepolisian.

Ini dapat diamati dari kalimat awal unggahan “*Geng² motor seperti ini sdh lama ada di Bandung. Dari dulu kerjaannya memang slalu bikin masalah, sok jago. beraninya maen kroyokan*”, dan kalimat di akhir unggahan “*Polisi mendadak jadi buta dan tuli Kalo ada warganya yang melapor sebagai korban geng tai*”. Representasi ini diawali dengan rangkaian kalimat yang menyatakan keluh kesah warganet terhadap maraknya geng motor. Keluhan yang dialami Masyarakat ini dideskripsikan tidak lepas dari kinerja kepolisian yang tidak dapat menanggulangi gerombolan geng motor tersebut. Selanjutnya, pengunggah turut menampilkan argumen yang menyatakan bahwa aparat kepolisian terkesan tidak peduli dengan laporan masyarakat. Sehingga, keseluruhan teks ini memberikan kesimpulan bahwa aparat kepolisian memiliki representasi negatif. Representasi negatif yang dimaksud adalah tidak peduli dan tidak berdaya dalam mengatasi kasus kejahatan.

B. Dimensi Praktik Wacana

Kemunculan wacana #percumalaporpolisi sebagai penggambaran representasi terhadap aparat kepolisian, tidak dapat dipisahkan dari latar belakang penyusun wacana tersebut, yaitu Warganet Indonesia. Hal ini telah disinggung pada penjelasan teori sebelumnya. Praktik wacana merupakan dimensi yang tidak boleh terlewatkan dalam analisis wacana kritis ini. Praktik wacana berperan penting sebagai hal yang turut memunculkan suatu wacana. Hal ini disebabkan wacana atau teks tidak terlepas dari bagaimana proses produksi maupun latar belakang yang menghasilkan wacana tersebut.

Latar belakang, atau karakteristik dari warganet Indonesia pada dimensi ini memiliki pengaruh signifikan dalam hadirnya wacana #percumalaporpolisi di *Twitter* (X). Salah satu contoh dari dimensi praktik wacana ini adalah bagaimana pandangan warganet Indonesia terhadap aparat kepolisian yang akhirnya mempengaruhi kemunculan wacana tersebut. Secara lebih jelas, aspek pertama yang perlu dipahami dari latar belakang warganet, sebagai bagian dari praktik wacana ini adalah karakteristik umum dari perilaku warganet Indonesia sebagai pengguna *Twitter*.

Warganet Indonesia pada umumnya merupakan warganet yang aktif dalam bermedia sosial. Hal ini dibuktikan dengan survey dari tahun ke tahun yang menampilkan beberapa negara yang paling aktif di internet. Beragam survey tersebut memasukkan negara Indonesia ke peringkat lima besar negara dengan pengguna internet paling aktif, atau negara dengan pengguna media sosial media terbanyak. Pengguna internet di Indonesia pada umumnya berasal dari beragam kalangan usia, apabila ditinjau dari statistik umur pengguna pada umumnya. Ketika ditinjau secara spesifik, generasi muda di Indonesia mendominasi jumlah pengguna internet. Perwujudan dari statistik yang dapat ditemukan adalah demografis pengguna *Twitter* (X) yang didominasi oleh pengguna berusia 18 – 24 tahun (Nisriyana, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kawula muda memiliki caranya tersendiri untuk saling berbagi informasi dan memperoleh informasi apapun.

Apabila ditinjau dari aspek perilaku pengguna media sosial tersebut, kecenderungan pengguna media sosial (*twitter*) dalam berinteraksi di media sosial tersebut tidak dapat dilepaskan dari perilaku warganet Indonesia secara umum di Internet. Salah satu perilaku warganet pengguna *twitter/X* yang menjadi sorotan adalah kebiasaan untuk berkomentar kasar, bahkan menjurus kepada *cyber bullying*. Tidak jarang, komentar tersebut merugikan orang lain hingga menjurus kepada kasus kematian akibat tidak semua orang sanggup dengan komentar semacam itu (Yulieta et al., 2021). Perilaku warganet Indonesia secara negatif tercermin dalam survey skala global dari *Microsoft Digital Civility Index* pada tahun 2020, yang menyatakan bahwa warganet Indonesia merupakan warganet paling tidak sopan se-Asia Tenggara (Rosa, 2022). Literasi warganet

Indonesia yang minim dan kurangnya pengetahuan orang tua bagaimana menggunakan perangkat canggih seperti ponsel pintar, menyebabkan peluang persebaran berita palsu, atau fitnah tersebar di media sosial. Celah-celah tersebut memberikan peluang bagi warganet yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menyebarkan fitnah, provokasi dan penipuan di media sosial. (Chica Septia Ningsih et al., 2021)

Hal berikutnya yang mempengaruhi representasi tersebut adalah latar belakang yang membentuk bagaimana pola pikir warganet terhadap aparat kepolisian. Warganet Indonesia cenderung tidak mudah percaya dengan aparat kepolisian. Hal ini tidak saja tercermin dalam sejumlah pendapat negatif warganet, tetapi juga oleh beberapa survei kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Survey – survey tersebut memberikan gambaran bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparat bersifat dinamis. Artinya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dapat berubah – ubah setiap waktu. Kepercayaan tersebut dapat naik atau menurun tergantung situasi yang terjadi. Umumnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian merosot turun saat adanya pemberitaan negatif ulah oknum kepolisian. Sentimen negatif masyarakat terhadap aparat kepolisian akan semakin kuat saat oknum yang berulah viral di masyarakat.

Pandangan negatif masyarakat (warganet) Indonesia terhadap aparat kepolisian pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Masyarakat Indonesia sudah cukup sering mengkritik aparat kepolisian sejak dahulu kala. Beberapa perilaku negatif aparat kepolisian hingga skandal yang melibatkan aparat kepolisian sepanjang sejarah, memicu kritik sosial terhadap institusi kepolisian ini. Kritik yang bermunculan tidak hanya muncul dari pemberitaan media massa besar, tetapi juga melalui cerita mulut ke mulut (cerita masyarakat yang mengalami pungli, pengabaian laporan atau pelayanan buruk). Pemberitaan atau cerita tentang perilaku negatif aparat kepolisian yang berlangsung sejak lama akhirnya turut membentuk ketidakpercayaan tersebut.

Kritik sosial ini semakin marak saat kebebasan beropini dan era Reformasi mendukung hal tersebut. Masyarakat Indonesia (warganet) semakin berani untuk menyorot perilaku negatif aparat kepolisian dan memberikan kritik terhadap aparat di media sosial. Tidak hanya melalui media massa, aktivisme siber warganet turut mempopulerkan hal tersebut. Implementasi dari pergerakan ini diwujudkan masyarakat (warganet) dalam tagar #1hari1oknum dan tagar #percumalaporpolisi di media sosial. Tagar yang berawal dari pemberitaan buruknya perilaku oknum polisi dapat dengan mudah dimunculkan oleh warganet di media sosial, hingga menarik perhatian dari instansi terkait, yaitu instansi Polri yang menjadi sasaran warganet.

Perilaku lainnya sejumlah warganet Indonesia, terutama pengguna *Twitter/X* adalah berkata kasar, dan mudah menyebarkan *hoax*. Fenomena ini sedang marak di Indonesia. Secara tidak langsung, viralnya #percumalaporpolisi sedikit banyaknya dipengaruhi oleh hal ini. Warganet Indonesia tidak sedikit yang memiliki kecenderungan untuk mudah menghujat apa yang mereka benci. Ironisnya, warganet dengan pendidikan tinggi sekalipun juga memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang sama. Kritik sosial yang dilontarkan kepada suatu pihak, terutama kepada penegak hukum, dapat tercemar dengan ujaran yang mengarah kepada kebencian.

C. Dimensi Praktik Sosial

1. Situasional

Project Multatuli, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak dalam jurnalisme independen mengabarkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 2021 silam. Kasus kekerasan seksual tersebut menimpa tiga

orang anak, dengan pelaku yang merupakan ayah kandung mereka sendiri. Kejadian nahas tersebut sebetulnya sudah terjadi pada tahun 2019 silam, namun baru terekspos setelah pihak *Project Multatuli* menuliskan berita tersebut dengan melibatkan salah satu jurnalis di *Project Multatuli*, Eko Rusdianto pada 2021 silam. Kompas.TV (2021) mengungkapkan bahwa Eko harus mendalami terlebih dahulu perspektifnya mengenai Penyintas dan Perempuan, sebelum akhirnya dia mampu untuk menulis berita kasus pemerkosaan tersebut, yang ditemukan olehnya dalam laporan LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Setelah mendalami hal tersebut dengan sebaik – baiknya, dirinya semakin yakin untuk menuliskan kasus tersebut, terlebih lagi setelah turut menyimak dengan seksama penuturan ibu korban, Ny. Lidya melalui rekaman suara. Pemberitaan yang ditulis oleh *Project Multatuli* turut memberitakan bahwa ibu dari ketiga korban berupaya melapor ke pihak kepolisian, agar kasus tersebut diusut. Sayangnya, pihak kepolisian menolak untuk mengusut kasus tersebut dan terkesan melindungi pelaku.

Pemberitaan kasus tersebut, kemudian tersebar melalui situs *Twitter/X*. Warganet Indonesia yang turut menjadi pengguna *Twitter/X* pada saat itu kemudian geram, dan sangat menyayangkan tindakan aparat kepolisian tersebut. Sebelumnya, masyarakat (warganet) Indonesia beberapa tahun belakangan mengeluhkan betapa buruknya perilaku sejumlah oknum aparat kepolisian yang tidak mengayomi dan tidak bertugas sebagaimana mestinya. Viralnya kasus tersebut kemudian menjadi pemantik bagi warganet Indonesia pengguna twitter untuk menaikkan tagar #percumalaporpolisi di bulan yang sama. Tagar tersebut tidak hanya berisi reaksi negatif warganet atas pemberitaan tersebut, tetapi turut dipenuhi dengan keluh kesah atau cerita pengalaman buruk dengan aparat kepolisian di Indonesia.

2. Sosial

Salah satu hal yang harus dipahami dari fenomena tersebut, kepercayaan warganet atau Masyarakat terhadap aparat kepolisian bersifat dinamis, bukan bersifat statis. Kepercayaan Masyarakat dapat berubah-ubah tergantung dengan bagaimana perilaku aparat kepolisian saat itu. Setiap perilaku negatif aparat viral diberitakan di berbagai media, maka kepercayaan Masyarakat menurun kembali (Mansur & Purnama Putra, 2023). Kepolisian Indonesia masih harus terus memperbaiki kinerjanya. Kepolisian tidak bisa berpuas diri begitu saja ketika kepercayaan Masyarakat terhadap aparat kepolisian meningkat kembali.

Djamaluddin et al. (2023) mengemukakan bahwa aktivisme digital yang terjadi turut mempengaruhi bagaimana tagar ini akhirnya menjadi viral di media sosial. Definisi dari aktivisme digital adalah merupakan pergerakan yang diawali dari adanya suatu topik menjadi perbincangan. Topik tersebut kemudian menjadi viral melalui algoritma media sosial, dan menarik perhatian masyarakat luas. Tagar #percumalaporpolisi terdiri dari beragam *tweet* yang memiliki satu maksud dan tujuan; menyuarakan keresahan masyarakat terhadap aparat kepolisian yang dipicu dari kasus kekerasan seksual. Tagar yang awalnya digagas oleh warganet dari akun @projectm_org ini menghimpun beragam percakapan warganet twitter yang memiliki pemikiran sejalan dengan topik dari tagar ini.

Fenomena *symbolic convergence of activism* merupakan fenomena yang turut terjadi dalam viralnya #percumalaporpolisi di twitter. Fenomena ini terjadi akibat adanya satu fenomena sosial yang dipicu oleh suatu peristiwa besar, kemudian menjadi sebuah topik yang diramalkan oleh warganet lainnya dengan beragam keresahan yang dialami. Keresahan yang dimaksud adalah perilaku aparat kepolisian yang tidak etis dan melanggar hukum.

3. Institutional

Sejak dahulu kala, keluhan masyarakat terhadap aparat kepolisian sudah cukup sering muncul dari mulut ke mulut. Masyarakat mengeluhkan tindakan aparat kepolisian yang tidak mengayomi masyarakat sebagaimana mestinya. Pada zaman ORBA, POLRI dalam naungan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sempat dikritik oleh masyarakat karena perbedaan doktrin yang tidak seharusnya dianut oleh POLRI sebagai penegak hukum (Sumino & Sutrischastini, 2017). Seiring dengan masuknya era Reformasi dan pesatnya teknologi informasi, Sorotan negatif terhadap aparat kepolisian semakin terlihat. Aktivisme siber dapat muncul ketika media sosial seperti twitter menjadi medium dalam kebebasan berpendapat, didukung oleh perbincangan informal masyarakat terhadap suatu topik dan algoritma media sosial seperti *Twitter* (Latief, 2023). Beberapa kali perilaku negatif aparat kepolisian menjadi viral akibatdirnya *twitter/X* sebagai medium opini masyarakat, kemudian masyarakat beramai-ramai membicarakan hal tersebut, dan algoritma media sosial tersebut menaikkannya lewat fitur *trending topic*.

Serangkaian perilaku aparat kepolisian yang negatif tersebut tidak hanya viral di media sosial dan media massa saja. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) menegaskan dalam laporan tahunannya pada Juni 2022, aparat kepolisian belum kunjung menunjukkan perbaikan secara signifikan. Kepolisian masih dihadapkan tindakan semena - mena aparat kepolisian. Salah satu contohnya, 677 kasus kekerasan melibatkan aparat kepolisian sepanjang Juli 2021 – Juni 2022. (KontraS, 2022)

Semboyan Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) Polri akhirnya dianggap tidak terlihat implementasinya sama sekali. Hal senada juga turut dipaparkan oleh Ombudsman RI pada tahun 2020 silam. Ombudsman RI mendeskripsikan Polri merupakan institusi yang banyak melakukan maladministrasi (urutan kedua setelah lembaga Pemerintahan Daerah/Pemda). Ini mengindikasikan adanya sejumlah aparat kepolisian yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Impunitas yang terjadi dilembaga kepolisian ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga menjadi permasalahan HAM secara global. (Pradjasto & Tanlain, 2022). Impunitas yang berlaku dalam lembaga tersebut turut memperparah masalah tersebut. Impunitas kepolisian menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian semakin tergerus (Hidayat, 2022).

Viralnya *#percumalaporpolisi* turut menorehkan catatan hitam kepolisian, dan tentunya semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap POLRI secara signifikan. Narasi *#percumalaporpolisi* berikutnya disusul dengan serangkaian kontroversi aparat kepolisian yang muncul, dan turut diperbincangkan warganet dalam tagar yang sama. Kontroversi yang dimaksud seperti rangkaian kasus lainnya, yang turut diperbincangkan oleh warganet meliputi; Pertama, kasus Ferdi Sambo yang membunuh ajudannya sendiri, Brigadir Joshua. Warganet turut dikejutkan dengan kasus penjualan barang bukti narkoba oleh Irjen Teddy Minahasa. Kontroversi Polisi berikutnya berupa insiden Stadion Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur, yang menewaskan 133 jiwa. Insiden tersebut terindikasi disebabkan oleh tembakan gas air mata polisi, mengakibatkan kepanikan massal penonton di stadion berujung jatuhnya korban jiwa.

SIMPULAN

Representasi masyarakat secara negatif terhadap aparat kepolisian dalam *#percumalaporpolisi* mendeskripsikan citra negatif aparat kepolisian secara implisit, atau eksplisit. Aparat kepolisian dideskripsikan secara negatif dengan penggunaan kata verba dan nomina berkontasi negatif. Konotasi negatif tersebut bertentangan dengan representasi positif yang diharapkan oleh masyarakat dari aparat kepolisian. Rangkaian kalimat dalam unggahan *Twitter/X* tersebut umumnya merupakan keluh kesah warganet terhadap aparat kepolisian.

Rangkaian kalimat maupun penggunaan beberapa kata verba dan nomina dalam unggahan tersebut memberikan petunjuk terhadap pembaca bahwa aparat kepolisian memiliki representasi negatif. Representasi negatif yang ditampilkan atau terdapat dalam teks mengacu pada deskripsi kinerja buruk aparat kepolisian.

Serangkaian representasi negatif ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat (warganet) Indonesia dalam bermedia sosial (terutama di *Twitter/X*), dan sikap warganet Indonesia dalam mempercayai aparat kepolisian. Sementara itu, dimensi praktik sosial yang melatarbelakangi kemunculan tagar tersebut berawal dari serangkaian kontroversi kepolisian, diperparah oleh impunitas dalam kepolisian, dan kemunculan kasus Luwu Timur yang memicu kemarahan warganet berujung pada viralnya tagar #percumalaporpolisi di *Twitter/X*. Representasi ini tidak semata-mata lahir begitu saja, ada pemicu dari faktor – faktor yang sudah terbentuk sejak lama. Aparat kepolisian sudah terlebih dahulu dikritik oleh masyarakat tidak hanya dari bagaimana kinerja mereka, kontroversi pembentukan ABRI (Aparat Bersenjata Republik Indonesia) menjadi kritikan bagi Polri. Secara keseluruhan, kelemahan dari penelitian ini terletak pada cakupan analisis dimensi teks yang hanya berfokus pada representasi belaka, dan sumber data yang hanya berasal dari satu media sosial saja. Ada beberapa peluang bagi penelitian selanjutnya agar fenomena #percumalaporpolisi maupun fenomena kritik sejenis dipaparkan secara mendalam. Pertama, penelitian dapat dilakukan dengan analisis dimensi teks yang lebih mendalam. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan teori lainnya, Terakhir, Sumber data yang lebih beragam diharapkan dapat mendukung analisis lebih mendalam pada penelitian selanjutnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada pihak yang telah memberikan kesempatan dan segala dukungan dalam penelitian ini, yaitu Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, dan dosen – dosen pembimbing yang telah memberikan segala dukungan, kritik, serta masukan atas penelitian yang tertuang dalam artikel jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat. In *Jurnal Literasi Hukum*. <https://core.ac.uk/download/pdf/270149732.pdf>
- Albaburrahim, A., & Sujinah, S. (2017). Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan Kasus Papa Minta Saham di Metro TV. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/lf.v1i2.552>
- Astuti, V. K. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Pemberian Labeling Oleh Warganet Kepada Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Menyimpang. *Legal Spirit*, 6(2). <https://doi.org/10.31328/lis.v6i2.3762>
- Chica Septia Ningsih, Amelia, C., Aisyah, P., Zahera, R., & Ika Prasetya, W. (2021). Hak Kebebasan Berpendapat yang Semakin Menyempit dan Memburuk. *Jurnal Syntax Fusion*, 1(2). <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i2.18>
- Djamaluddin, A. R., Hastjarjo, S., & Satyawan, I. A. (2023). Analysis Of the Symbolic Convergence of Activism with the Hashtag #PercumaLaporPolisi on Twitter Social Media as A Virtual Public Space. *Journal of Social Interactions and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.55927/jsih.v2i1.2866>
- Eriyanto. (2015). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (N. H. S.A, Ed.). LKiS Yogyakarta.

- Fairclough, N. (2003). *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research* (1st ed.). Routledge.
- Fitria, B. F. M., & Candrasari, Y. (2023). Analisis Wacana Kritis dalam Pemberitaan Liputan6.com tentang #PercumaLaporPolisi Periode Oktober 2021. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i6.2230>
- Hidayat, R. (2022, June 3). *Impunitas Anggota Polri Cederai Rasa Keadilan Masyarakat*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/impunitas-anggota-polri-cederai-rasa-keadilan-masyarakat-lt6299f6615dc6b/>
- Huey, L., & Broll, R. (2012). "All it takes is one TV show to ruin it": A police perspective on police-media relations in the era of expanding prime time crime markets. *Policing and Society*, 22(4). <https://doi.org/10.1080/10439463.2011.641556>
- Kompas.TV. (2021, October 14). *Eko Rusdianto, Jurnalis Project Multatuli Ungkap Alasan Menulis Kasus Pemerksaan di Luwu Timur*. Kompas TV. <https://www.kompas.tv/nasional/221764/eko-rusdianto-jurnalis-project-multatuli-ungkap-alasan-menulis-kasus-pemerksaan-di-luwu-timur>
- KontraS. (2022). *Laporan Hari Bhayangkara ke - 76 "Persisi: Perbaikan Palsu Institusi Polri."* https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Final_Laporan-Bhayangkara-KontraS-2022.pdf
- Latief, R. (2023). Aktivisme Siber dan Gerakan Sosial Baru di Twitter : Analisis Wacana Kasus Penembakan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat. *Jambura Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(1). <https://doi.org/10.37905/jik.v1i1.42>
- Mansur, A., & Purnama Putra, E. (2023, May 8). *Kepercayaan Masyarakat ke Polisi Membaik? Pakar: Belum Berubah*. Republika Online. <https://news.republika.co.id/berita/ruc9lx484/kepercayaan-masyarakat-ke-polisi-membaik-pakar-belum-berubah>
- Nisriyana, N. A. (2022, October 26). *Twitter Ungkap Pengguna Twitter di Indonesia Paling Banyak Gen Z*. Gadget Diva. <https://gadgetdiva.id/aplikasi/39225-pengguna-twitter-indonesia-terbanyak-gen-z/>
- Pradjasto, A., & Tanlain, E. C. (2022). Upaya Memutus Rantai Impunitas dan Tantangannya. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 15(1). <https://doi.org/10.58823/jham.v15i1.119>
- Rosa, M. C. (2022, March 22). *Penyebab netizen Indonesia disebut paling tidak sopan se-Asia Tenggara*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/03/26/110500081/penyebab-netizen-indonesia-disebut-paling-tidak-sopan-se-asia-tenggara>
- Sumino, S., & Sutrischastini, A. (2017). Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Polisi Sektor Bawang Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.32477/jrm.v4i2.50>
- Susyulowati, E. (2019). Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita Senandung Pulu 'Kartini Kendeng' Menolak Pabrik Semen Dalam Media Online Kompas. *LOA: Jurnal Ketatabahasaan Dan Kesusastraan*, 14(2). <https://doi.org/10.26499/loa.v14i2.1725>
- Wardani, V. A., & Kadarisman, Y. (2015). Persepsi masyarakat terhadap citra polisi lalu lintas di Polsek Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2(1).

- Yulieta, F. T., Syafira, H. N. A., Alkautsar, M. H., Maharani, S., & Audrey, V. (2021). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(8). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.298>
- Zeva, S., Rizqiana, I., Novitasari, D., & Radita, F. R. (2023). Moralitas Generasi Z di Media Sosial: Sebuah Esai. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2).